

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN PENDEKATAN DESKRIPTIF ASOSIATIF

THE EFFECT OF ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY ON VILLAGE FUND MANAGEMENT WITH AN ASSOCIATIVE DESCRIPTIVE APPROACH

Ikang Murapi*, Atirah, Dewa Ayu Oki Astarini

Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bumigora

ikangmurapi11@universitasbumigora.ac.id, atirah@gmail.com
astarini.oki@universitasbumigora.ac.id

Received: 2025-03-05. **Revised:** 2025-03-20. **Accepted:** 2025-03-30. **Issue Period:**
Vol.9 No.2 (2025), Pp. 723-736

Abstrak: Desa adalah sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya yang mempunyai peranan yang strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Proses pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua proses pengelolaan dana desa harus didasari asas transparansi, akuntabel dan partisipatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif asosiatif menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Desa Kowo Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Populasi dan Sampel dalam penelitian ini adalah desa Kowo dengan jumlah sampel 30 responden. Teknik analisis data yang digunakan yaitu, uji analisis deskriptif, uji model regresi linier berganda, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji T (Parsial), uji F (Simultan) dan koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa, semakin baik akuntabilitas maka semakin baik pula pengelolaan Desa. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa, semakin baik tingkat transparansi maka semakin baik pula pengelolaan Desa.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Dana Desa

Abstract: The village is a government organizational unit that deals directly with the community with all its interests and needs that have a strategic role, especially in carrying out tasks in the field of public services. The process of managing village funds starts from planning, implementation, administration, reporting and accountability. All village fund management processes must be based on the principles of transparency, accountability and participation. The type of research used in this study is descriptive associative research using quantitative methods. This study aims to analyze the Influence of Accountability and Transparency on Village



Fund Management Case Study of Kowo Village, Sape District, Bima Regency. The population and sample in this study were Kowo village with a sample size of 30 respondents. The data analysis techniques used were descriptive analysis test, multiple linear regression model test, classical assumption test consisting of normality test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test. Hypothesis testing in this study used the T test (Partial), F test (Simultaneous) and coefficient of determination (R²). The results of this study show that: Accountability has a positive and significant effect on Village Fund Management, the better the accountability, the better the village management. Transparency has a positive and significant effect on Village Fund Management, the better the level of transparency, the better the village management.

Keywords: *Accountability, Transparency, Village Fund Management*

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara kepulauan yang terdiri dari wilayah provinsi, Kabupaten dan kota yang berbentuk republik, dan dibawah Kabupaten dan Kota terdapat pemerintah desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berlakunya undang-undang tersebut bertujuan memberikan status dan kepastian hukum atas desa dalam sitem ketatanegaraan Republik Indonesia, desa memiliki kewenangan yang diberikan oleh negara dalam melestarikan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa [1].

Desa adalah sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya yang mempunyai peranan yang strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Desa diharapkan akan mengangkat desa pada posisi subjek yang terhormat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena akan menentukan format desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal, serta merupakan instrumen untuk membangun visi menuju kehidupan baru bagi desa yang mandiri. Untuk melaksanakan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat tentu pemerintah desa memerlukan dana. Dana desa adalah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh pemerintah desa, yang bertugas sebagai penyelenggara pengelolaan keuangan desa [2].

Anggaran tersebut diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 8 Tahun 2016 tentang dana desa yang menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan emasyarakatatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Proses pengelolaanj dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua proses pengelolaan dana desa harus didasari asas transparansi, akuntabel dan partisipatif. (Makalalag *et al*, 2017). Dalam mengelola keuangan desa diperlukan tata kelola yang baik, sumber daya yang cukup dan kompeten, agar dana yang sudah diterima dapat dipergunakan dengan efisien dan efektif sehingga diharapkan berdampak besar untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa serta dapat dipertanggungjawabkan [3].

Salah satu desa yang ada di Indonesia yang telah dianggarkan yaitu Desa Kowo. Desa Kowo adalah desa yang berada di Kabupaten Bima tepatnya di Kecamatan Sape yang memiliki potensial yang cukup, dalam sentra ekonomi, karena masyarakat desa Kowo memiliki penghasilan laut dan sebagian masyarakatada yang dibidang nelayan, pertanian dan perkebunan sehingga diharapkan pemerintah dapat mengelolah anggaran dana desa sebagai bentuk kesejahteraan dan keadilan terhadap masyarakat khususnya masyarakat desa Kowo Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Berikut anggaran dana desa 5 tahun terakhir yaitu Pada Tahun 2019-2023 Desa Kowo sendiri mendapatkan anggaran Dana Desa (ADD) mulai tahun 2019 sebesar Rp. 1.776.070.569, pada tahun 2020 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.628.414.033, pada tahun 2021 mendapatkan anggaran sebesar RP. 1.622.



602.337, pada tahun 2022 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.796.149.401 dan pada tahun 2023 desa Kowo mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.833.265.800. (Bendahara Desa).

Menurut pendapat Adhar, di Desa Kowo kurang akuntabel sehingga sikap kritis masyarakat ini semakin kuat seiring dengan munculnya kecurigaan, kecemburuan sosial, konflik horisontal, dan protes masyarakat terhadap ketidakadilan dalam pembagian tugas, Kinerja para aparatur pemerintah desa juga tidak semuanya dipandang dan dianggap buruk, kurangnya pengetahuan sebagian warga masyarakat, dengan nilai sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah terhadap peran dan fungsi pemerintah desa, atas kurangnya transparansi pemerintah desa, ketidaktahuan tentang program pemerintah desa dan tentang kebutuhan mereka berkaitan dengan pemerintah telah menjadikan warga masyarakat tidak memiliki cukup kontrol terhadap tugas-tugas yang telah dijalankan oleh para pemerintah desa.

Menurut pendapat dari Friska & Tamdin selaku Anggota BPD dan Karang Taruna, ada beberapa komentar dari mereka salah satunya mengenai fenomena yang terjadi di desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima yaitu, kurangnya transparansi dan akuntabel pemerintah desa. Berbagai bentuk program dari anggaran desa yang gagal dan tidak dilanjutkan adalah program pengembangan kawasan rumah pangan lestari (KRPL) dalam bidang pertanian dan peternakan yang tidak evisien, program pembangunan rehabilitas atau peningkatan fasilitas pengelola sampah dalam bidang kawasan permukiman yang membuat efek terjadinya ketidaknyamanan terhadap lingkungan masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari hari, program membuka jalan tani untuk akses ekonomi sehingga mampu mendorong sekelompok masyarakat dalam melakukan audensi bersama pemerintah desa Kowo untuk melakukan demonstrasi di depan Kantor Desa Kowo terkait ketidakadilan pemerintah desa Kowo dalam menjalankan program tersebut. Demostrasi dilakukan pada tahun 2021.

Penelitian yang dilakukan oleh [4] yang berjudul Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa (Studi kasus pada desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Bantang). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Variabel independen dan variabel dependen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan akuntabilitas, transparansi terhadap pengelolaan dana desa di desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajjukukang Kabupaten Bantaeng. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh [5] yang berjudul "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Namo Gajah", menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Bahwa semakin besar pengaruh akuntabilitas maka semakin besar maka semakin bagus pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh [6] pada penelitiannya tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa di desa Pebaloran Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah variabel independen yaitu akuntabilitas dan transparansi sedangkan variabel dependen yaitu pengelolaan dana desa. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa di Desa Pebaloran Kecamatan Enkerang.

Penelitian selanjutnya oleh [7] pada penelitiannya tentang pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi terhadap pengelolaan keuangan desa (studi kasus pada pemerintah desa di kecamatan cianjur). Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi linier berganda. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian dekriptif dan bersifat kausalitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas dan partisipasi masing-masing secara parsial berpengaruh dengan arah positif terhadap pengelolaan keuangan. Selanjutnya oleh [8] pada penelitiannya tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pencapaian *Good Governance* pada desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* pada desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *Good Governance* pada desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. Selanjutnya [9] penelitian tentang pengaruh transparansi akuntabilitas dan *responsive* terhadap pengelolaan keuangan desa di desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis statistic deskriptif. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel akuntabilitas dan *responsive* berpengaruh signifikan atau positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Berbeda dengan variabel transparansi yang berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Sedangkan secara simultan variabel transparansi, akuntabilitas dan responsif berpengaruh signifikan atau positif terhadap pengelolaan keuangan desa.



Pada penelitian yang dilakukan oleh [10] tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa menyatakan bahwa akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan transparansi secara parsial berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa, secara simultan akuntabilitas dan transparansi secara simultan mempengaruhi pengelolaan keuangan desa. Pada tahun yang sama Penelitian [11] tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa (Studi Kasus Desa-Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah). Variabel yang di amati dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu akuntabilitas dan transparansi sedangkan variabel dependen yaitu pengelolaan keuangan desa. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian dilakukan oleh [12] yang berjudul Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pemerintah Desa di Kabupaten Garut), menyatakan bahwa prinsip transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Selanjutnya [13] pada penelitiannya tentang pengaruh penggunaan add, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Metode dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan transparansi pengelolaan dana desa menunjukkan pengaruh negative secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penggunaan alokasi dana desa, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa berpengaruh secara bersama-sama terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pada penelitian yang dilakukan oleh [14] tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan anggaran. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran. Sedangkan transparansi juga berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran. Dengan demikian akuntabilitas dan transparansi yang baik akan secara signifikan akan berpengaruh terhadap tingkat pengelolaan anggaran. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh [15] tentang penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (Studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya transparansi mengenai anggaran yang dikelola pemerintah desa dalam hal ini pelaksanaan anggaran, sehingga masyarakat umumnya tidak mengetahui secara terperinci tentang APBDes. Bahkan proses transparansi ini tidak membawa dampak positif kepada tata pemerintahan yang ada di desa Tandu serta keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan tidak diketahui oleh masyarakat. Pelaksanaan program APBDes di desa Tandu juga tidak menerapkan akuntabilitas walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap inipertanggung jawaban hanya diberikan kepada pemerintah daerah.

Tujuan utama peneliti melakukan di desa Kowo karena adanya beberapa tanggapan dari masyarakat di desa Kowo belum transparan dan pandangan lain, bahwa kurang aspiratif, kurang responsif, dan kurang akuntabel. Sehingga berujung pada rendahnya kepercayaan masyarakat kepada aparatur pemerintah desa. Masyarakat tidak mungkin menolak semua keharusan yang berhubungan dengan pemerintah desa sebagai organisasi pemerintahan di tingkat paling bawah kritikan masyarakat pada umumnya bermuara pada penilaian bahwa aparatur pemerintah desa tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Temuan tersebut menjadi fenomena yang sangat perlu diangkat sebagai tanggapan dari peneliti terhadap pandangan yang disampaikan oleh beberapa masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut, penelitian –penelitian di atas menunjukkan adanya perbedaan temuan mengenai dampak akuntabilitas dan transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa. Hal inilah menjadi salah satu alasan peneliti menguji dan menganalisis kembali sistem akuntabilitas dan transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa dengan latar belakang fenomena dan objek yang berbeda, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa.

II. METODE DAN MATERI

Metode penelitian yang dipilih yaitu metode deskriptif asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Deskriptif asosiatif adalah untuk mengungkapkan kebenaran yang terkandung dalam masalah penelitian yaitu, untuk mengetahui pengaruh variabel bebas dan variabel terikat serta untuk mengetahui sebab dan akibat antara dua variabel atau lebih [16]. Menurut Sugiyono (2021) Adapun populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga dapat diartikan sebagai objek kajian oleh peneliti. Biasanya populasi inilah yang peneliti jadikan sebagai acuan dalam menentukan sampel, Dalam



penelitian ini, populasi mengacu pada Desa Kowo. Sampel dalam penelitian ini adalah aparat desa dan pihak lainnya yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Penarikan sampel menggunakan metode *Purpitive sampling*. *Purpitive sampling* yaitu cara pengambilan sampel secara sengaja yangtelah sesuai dengan yang ditetapkan dalam syarat penelitian meliputi: sifat, karakteristik, ciri dan Kriteria sampel tertentu [16]. Maka sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Perangkat desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Masyarakat desa yang menjabat sebagai Kepala Dusun dan Rukun Tetangga (RT). Masyarakat desa yang menjabat di pengurusan BPD, LPMD dan Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga (PKK) dan Pemuda Karang Taruna dengan jumlah responden sebanyak 30 responden.

III. PEMBAHASA DAN HASIL

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada 30 orang responden melalui kuisisioner yang telah disebarakan, telah dapat gambaran karakteristik responden. Uraian karakteristik responden ini menyangkut jenis kelamin, usia, masa kerja, dan pendidikan. Hasil distribusi frekuensi responden menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel. 1 berikut:

Tabel 1. Identitas Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Frekuensi	Presentase
Laki-laki	27	90 %
Perempuan	3	10 %
Total	30	100%

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan Tabel. 1 diatas dapat dilihat bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa responden dengan jenis kelamin lakilaki sebanyak 27 orang dengan presentase 90% dan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 3 orang dengan presentase 10%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa responden pada penelitian ini didominasi oleh laki-laki. Hal ini dikarenakan pemerintahan desa lebih membutuhkan pegawai laki-laki untuk pekerjaan dibagian lapangan atau meninjau langsung keadaan masyarakat.

Hasil distribusi frekuensi responden menurut usia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2 Identitas Berdasarkan Usia

No	Umur	Frekuensi	Presentase
1	21-30	9	30 %
2	31-40	5	16,7 %
3	41-50	6	20%
4	>50	10	33,3%
Total		30	100%

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan Tabel. 2 diatas dapat dilihat usia dari responden, adapun responden yang berusia dibawah 21-30 tahun berjumlah 9 orang dengan presentase 30%, responden yang berusia 31-40 tahun berjumlah 5 orang dengan presentase 16,7%, responden yang berusia 41-50 tahun berjumlah 6 orang dengan presentase 20% dan responden yang berusia >50 tahun berjumlah 10 orang dengan presentase 33,3% yang merupakan didominasi dengan responden yang berusia >50 tahun. Dengan hasil ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima memprioritaskan orang-orang yang sudah berpengalaman dalam bidangnya sehingga dapat memudahkan dalam bekerja sesuai dengan pekerjaan atau tugas yang diberikan masing-masing.

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarakan kepada responden, tingkat pendidikan pegawai dapat dilihat pada Tabel. 3 dibawah ini:

Tabel.3 Identitas Berdasarkan Pendidikan

No	JenjangPendidikan	Frekuensi	Presentasi
----	-------------------	-----------	------------



1	SD	2	6,7%
2	SMP	3	10%
3	SMA	19	63,3%
4	S1	6	20%
Total		30	100%

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan Tabel.3 diatas dapat dilihat identitas responden dengan jenjang pendidikan SD berjumlah 2 orang dengan presentase 6,7%, jenjang pendidikan SMP berjumlah 3 orang dengan presentase terbanyak 10%, jenjang pendidikan SMA berjumlah 19 orang dengan presentase 63,3%, dan S1 berjumlah 6 orang dengan presentase 20%. Dapat kita tarik kesimpulan responden pada penelitian ini didominasi oleh karyawan yang memiliki jenjang pendidikan terakhir SMA. Hal ini dikarenakan pemerintah Desa Kowo Kecamatan Sape Kabupaten Bima membutuhkan pegawai yang memiliki kemampuan kerja yang efektif dan mampu sehingga tanggung jawab yang diberikan dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarakan kepada responden, jabatan pegawai dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.4 Identitas Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Frekuensi	Presentasi
1	KepalaDesa	1	3,3%
2	Sekretaris	1	3,3%
3	KetuaBPD	1	3,3%
4	AnggotaBPD	7	23,3%
5	KetuaPPK	3	10%
6	KetuaRT	8	26,7%
7	KepalaDusun	3	10%
8	KarangTaruna	4	13,3%
9	LKMD	2	6,7%
Total		30	100%

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan Tabel.4 diatas dapat dilihat identitas responden berdasarkan jabatan yaitu Kepala Desa, Sekretaris, Ketua BPD, Anggota BPD berjumlah 7 orang dengan presentase 23,3%, ketua PPK berjumlah 3 orang dengan presentase terbanyak 10%, ketua RT berjumlah 8 orang dengan presentase 26,7%, kepala dusun berjumlah 3 orang dengan presentase 10%, karang taruna berjumlah 4 orang dengan presentase 13,3% dan LKMD berjumlah 2 orang dengan presentase 6,7%.

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarakan kepada responden, masa kerja pegawai dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 5 Identitas Berdasarkan Masa Kerja

No	JenjangMasaKerja	Frekuensi	Presentasi
1	3 tahun	4	13,3%
2	5 tahun	15	50%
3	6 tahun	8	26,7%



4	Sesuai dengan usia max 60 tahun	3	10%
Total		30	100%

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan Tabel.5 diatas dapat dilihat identitas responden dengan masa kerja 3 tahun berjumlah 4 orang dengan presentase 13,3%, responden dengan masa kerja 5 tahun berjumlah 15 orang dengan presentase terbanyak 50%, responden dengan masa kerja 6 tahun berjumlah 8 orang dengan presentase 26,7% dan untuk Kepala Dusun untuk masa kerjanya mengikuti usia maksimal 60 tahun sesuai dengan batas akhir masa jabtannya.

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarakan kepada responden, status perkawinan pegawai dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.6 Identitas Berdasarkan Status Perkawinan

No	StatusPerkawinan	Frekuensi	Presentasi
1	Kawin	26	80%
2	BelumKawin	4	20%
Total		30	100%

Sumber: Data Primer 2024

Berdasarkan Tabel.6 diatas dapat dilihat identitas responden berdasarkan status perkawinan pegawai dapat dilihat bahwa pegawai dengan status kawin berjumlah 26 orang dengan presentase 80% dan status belum kawin berjumlah 4 orang dengan presentase 20%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pegawai berdasarkan status perkawinan di dominasi oleh status kawin.

Penelitian ini mengambil populasi didesa yang ada di Kecamatan Sape Kabupaten Bima yang menjadi sampel penelitian ini adalah Desa Kowo yang berada di Kecamatan Sape Kabupaten Bima sebanyak 30 Responden Jumlah Kuesioner yang diisi sebanyak 30 (100%) kuesioner. Dimana yang pertama perempuan sebanyak 3 orang dan Laki-Laki 27 orang. Dengan demikian penelitian ini menggunakan instrument kuesioner yang terdiri dari 7 butir pernyataan untuk variabel X1,X2 dan Y. Jumlah keseluruhan pernyataan adalah sebanyak 21 butir pernyataan. Mengenai kuesioner yang diisi rata rata responden lebih banyak yang menjawab setuju terhadap variabel transparansi dibandingkan dengan akuntabilitas. Adapun analisis deskriptif ini merupakan uraian mengenai hasil dari pengumpulan data primer (kuesioner) yang dibagikan kemudian didisi oleh responden.

Tabel.7 Stastik Deskriptif

DescriptiveStatistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas	30	14,00	34,00	22,0667	4,98918
Transparansi	30	14,00	34,00	23,3000	5,35724
PengelolaanDanaDesa	30	13,00	33,00	22,5000	5,15785
ValidN(listwise)	30				

Sumber: Data Primer 2024

Pada Tabel.7 diatas akuntabilitas menunjukkan nilai minimum sebesar 14, sedangkan nilai maksimum sebesar 34. Rata-rata variabel akuntabilitas sebesar 22,0667 dengan nilai standar deviasi sebesar 4,98918. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata variabel akuntabilitas relatif besar dengan melihat dekatnya nilai rata-rata dengan nilai maksimum, sedangkan varian data relative besar dengan melihat jauhnya nilai rata-rata dengan standar deviasi. Transparansi menunjukkan nilai minimum sebesar 14, sedangkan nilai maksimum sebesar 34. Rata-rata variabel transparansi sebesar 23,3000 dengan nilai standar deviasi sebesar 5,35724. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata variabel transparansi relatif besar dengan



melihat dekatnya nilai rata-rata dengan nilai maksimum, sedangkan varian data relative besar dengan melihat jauhnya nilai rata-rata dengan standar deviasi. Pengelolaan Dana Desa menunjukkan nilai minimum sebesar 13 sedangkan nilai maksimum sebesar 33. Rata-rata variabel pengelolaan dana desa sebesar 22,5000 dengan nilai standar deviasi sebesar 4, 15785. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa rata-rata variabel pengelolaan dana desa relatif besar dengan melihat dekatnya nilai rata-rata dengan nilai maksimum, sedangkan varian data relatif besar dengan melihat jauhnya nilai rata-rata dengan standar deviasi.

Uji validitas ini digunakan untuk mengukur tingkat keakuratan sebuah instrument penelitian. Adapun metode yang digunakan pada uji validitas ini menggunakan pearson correlation, Dimana dikatakan valid jika nilai konsistensi alat ukur yang digunakan dalam uji validitas memiliki kriteria apabila suatu indikator kriteria dikatakan valid apabila nilai rhitung lebih besar dari rtabel atau dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Untuk mengetahui rhitung peneliti menggunakan alat bantu SPSS 26.

Tabel.8 Uji Validitas Instrumen Akuntabilitas

Indikator	Butir Pertanyaan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Pertanggungjawaban Hukum	X1.1	0,839	0,349	Valid
Pertanggungjawaban Kinerja	X1.2	0,834	0,349	Valid
Pertanggungjawaban Program	X1.3	0,843	0,349	Valid
Pertanggungjawaban Kebijakan	X1.4	0,765	0,349	Valid
Pertanggungjawaban Finansial	X1.5	0,895	0,349	Valid
	X1.6	0,853	0,349	Valid
	X1.7	0,897	0,349	Valid

Sumber: Data diolah menggunakan program SPSS 26

Berdasarkan Tabel.8 diatas, dapat dilihat bahwa semua butir pertanyaan yang terdapat pada semua kuesioner tentang akuntabilitas dalam penelitian ini mempunyai nilai koefisien korelasi hitung (rhitung) yang lebih besar dari standar korelasi (rtabel) yaitu 0,349. Hal ini menunjukkan instrumen yang digunakan valid.

Tabel. 9 Uji Validitas Instrumen Transparansi

Indikator	Butir Pertanyaan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen	X2.1	0,852	0,349	Valid
Kejelasan dan Kelengkapan Informasi	X2.2	0,843	0,349	Valid
	X2.3	0,834	0,349	Valid
	X2.4	0,897	0,349	Valid
	X2.5	0,832	0,349	Valid
	X2.6	0,887	0,349	Valid
	X2.7	0,866	0,349	Valid

Sumber: Data diolah menggunakan program SPSS 26

Berdasarkan Tabel. 9 diatas, dapat dilihat bahwa semua butir pertanyaan yang terdapat pada semua kuesioner tentang transparansi dalam penelitian ini mempunyai nilai koefisien korelasi hitung (rhitung) yang lebih besar dari standar korelasi (rtabel) yaitu 0,349. Hal ini menunjukkan instrumen yang digunakan valid.



Tabel. 10 Uji Validitas Instrumen Pengelolaan Dana Desa

Indikator	Butir Pertanyaan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Pengelolaan Keuangan Desa	Y.1	0,868	0,349	Valid
Perencanaan	Y.2	0,807	0,349	Valid
Pelaksanaan	Y.3	0,869	0,349	Valid
Penatausahaan	Y.4	0,782	0,349	Valid
Pelaporan	Y.5	0,840	0,349	Valid
Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Y.6	0,892	0,349	Valid
	Y.7	0,821	0,349	Valid

Sumber: Data diolah menggunakan program SPSS 26

Berdasarkan Tabel.10 diatas, dapat dilihat bahwa semua butir pertanyaan yang terdapat pada semua kuesioner tentang pengelolaan dana desa dalam penelitian ini mempunyai nilai koefisien korelasi hitung (rhitung) yang lebih besar dari standar korelasi (rtabel) yaitu 0,349. Hal ini menunjukkan instrumen yang digunakan valid.

Uji reliabilitas ini dilakukan untuk menguji reliabel atau tidaknya jawaban responden terhadap pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner dengan menggunakan rumus *Cronbach Alpha*. Indikator dikatakan reliabel jika *Cronbach Alpha* lebih besar 0,70, maka dikatakan reliabel, sebaliknya jika *Cronbach Alpha* lebih kecil dari 0.70, maka dinyatakan tidak reliabel.

Tabel. 11 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Nilai Alpha	Standar Nilai Alpha	Keterangan
1.	Akuntabilitas	0,934	0,70	Reliabel
2.	Transparansi	0,940	0,70	Reliabel
3.	Pendanaan Desa	0,928	0,70	Reliabel

Sumber: Data diolah menggunakan program SPSS 26

Berdasarkan Tabel.11 diatas, hasil uji reliabilitas variabel diatas dapat diketahui nilai α dari variabel akuntabilitas adalah sebesar 0,934, nilai α variabel transparansi adalah sebesar 0,940, dan nilai α variabel pengelolaan dana desa adalah sebesar 0,928. Hasil dari α dari setiap variabel tersebut menunjukkan bahwa nilainya lebih dari 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengelolaan dana desa, akuntabilitas dan transparansi dapat dinyatakan reliabel dan seluruh data pada penelitian ini dapat dijadikan instrumen penelitian.

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model persamaan regresi berganda variabel bebas, variabel kontrol dan variabel terikat yang digunakan mempunyai berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang dilakukan terhadap sampel dilakukan dengan menggunakan *kolmogrov-smirnov test* dengan menentukan derajat keyakinan (α) sebesar 5% (0,05). Kriteria pengujian dengan melihat *kolmogrov smirnov-test* adalah sebagai berikut: Jika signifikansi $>0,05$ maka data tersebut berdistribusi normal dan Jika signifikansi $<0,05$ maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

Tabel. 12 Hasil Uji One Sample Kolmogrov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test



		Unstandardized Residual
N		30
NormalParameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.44425565
MostExtreme Differences	Absolute	.097
	Positive	.097
	Negative	-.063
TestStatistic		.097
Asymp.Sig.(2-tailed)		.200 ^{c,d}
a.Testdistributionis Normal.		
b.Calculatedfromdata.		
c.LillieforsSignificanceCorrection.		
d.Thisisalower boundofthetruesignificance.		

Sumber: Data diolah menggunakan program SPSS 26

Berdasarkan Tabel. 12 diatas dapat diketahui bahwa nilai Asymp.Sig. (2-tailed) dari variabel penelitian yaitu akuntabilitas, transparansi dan pengelolaan danadesa sebesar 0,200. Karena nilai Asymp.Sig (2-tailed) = 0,200 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa ketiga dari data variabel penelitian berdistribusi normal.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel independen saling berhubungan secara linier dan untuk mengetahui apakah antar variabel bebas yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna. Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya, dan *variance inflaction* faktor (VIF). Cara mengetahui ada tidaknya penyimpangan uji multikolinieritas adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF masing-masing variabel independen, jika nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka data bebas dari gejala multikolinieritas, dan sebaliknya,. Berdasarkan hasil regresi variabel independen dan dependen, menghasilkan nilai *tolerance* dan VIF pada tiap-tiap persamaan pada Tabel. 13 dibawah ini:

Tabel. 13 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		CollinearityStatistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Akuntabilitas	.523	1.912
	Transparansi	.523	1.912
a.DependentVariable:PengelolaanDanaDesa			

Sumber: Data diolah menggunakan program SPSS 26

Berdasarkan Tabel. 13 diatas dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* pada masing-masing variabel independen akuntabilitas adalah 0,523 > 0,10 dan nilai VIF 1.912 < 10, variabel transparansi adalah 0,523 > 0,10 dan nilai VIF 1.912 < 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji multikolinieritas terjadi korelasi antara independen atau dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas.

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah di dalam sebuah model regresi dalam penellitian terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Dalam penelitian ini dapat dilakukan menggunakan uji *Glejser*. Uji *Glejser* adalah uji hipotesis untuk mengetahui apakah sebuah model regresi memiliki indikasi heteroskedastisitas dengan cara meregres absolut residual.

Tabel. 14 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a	
---------------------------	--



Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	4.609	1.300		3.545	.001
	Akuntabilitas	.019	.074	.060	.251	.804
	Transparansi	-.135	.069	-.471	-1.963	.060

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: Data diolah menggunakan program SPSS 26

Berdasarkan Tabel. 14 diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel akuntabilitas lebih besar dari 0,05 atau 0,804 > 0,05. Pada variable transparansi nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 atau 0,060 > 0,05. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi pengelolaan dana desa berdasarkan variabel yang mempengaruhinya yaitu akuntabilitas dan transparansi.

Analisis Regresi Linier Berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana perubahan variable independen yang lebih dari satu terhadap variabel dependen, analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa. Hasil pengujian regresi sebagai berikut:

Tabel. 15 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.858	2.292		.374	.711
	Akuntabilitas	.576	.130	.557	4.416	.000
	Transparansi	.384	.121	.398	3.158	.004

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Data diolah menggunakan program SPSS 26

Berdasarkan hasil regresi linier berganda pada Tabel.15 diatas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda tersebut diperoleh nilai konstanta sebesar 0,858, hal ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada pengaruh variabel akuntabilitas dan transparansi maka besarnya nilai peningkatan pengelolaan dana desa sebesar 0,858. Berdasarkan persamaan regresi linier berganda tersebut diperoleh nilai variabel akuntabilitas sebesar 0,576 dengan arah positif, hal ini terjadi jika setiap peningkatan pada variabel akuntabilitas akan meningkatkan pengelolaan dana desa sebesar 0,576 dengan asumsi variabel bebas lainnya adalah tetap. Dengan demikian jika akuntabilitas tinggi maka pengelolaan dana desa akan semakin baik. Berdasarkan persamaan regresi linier berganda tersebut diperoleh nilai variabel transparansi sebesar 0,384 dengan arah positif, hal ini terjadi jika setiap peningkatan pada variabel transparansi akan meningkatkan pengelolaan dana desa sebesar 0,384 dengan asumsi variabel bebas lainnya adalah tetap. Dengan demikian jika tingkat transparansi tinggi maka pengelolaan dana desa akan semakin baik. Berdasarkan bahwa koefisien dari masing-masing variabel bebas yaitu akuntabilitas dan transparansi memiliki nilai positif, artinya kedua variabel bebas tersebut berpengaruh positif terhadap variabel terikat yaitu pengelolaan dana desa.

Pengujian secara parsial dilakukan untuk mengetahui atau membuktikan hubungan yang signifikan tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut hasil perhitungan t hitung serta tingkat signifikansi masing-masing variabel X terhadap variabel Y dalam penelitian ini yaitu:

Tabel. 16 Hasil Uji t

No	Variabel	t hitung	t tabel	Sig.	Keterangan
1	Akuntabilitas	4,416	2,051	0,000	Signifikan
2	Transparansi	3,158	2,051	0,004	Signifikan

Sumber: Data diolah menggunakan program SPSS 26



Berdasarkan Tabel.16 diatas dapat dilihat bahwa nilai t tabel didapat dengan menentukan tingkat kepercayaan yaitu $0,05 : 2 = 0,025$ dan menentukan derajat bebas yaitu $30 - 3 = 27$ dan df pada kolom 27 dengan nilai t tabel sebesar 2,051.

Variabel akuntabilitas memiliki nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $4,416 > 2,051$. Hal ini menunjukkan bahwa H1 diterima, variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Variabel transparansi memiliki nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $3,158 > 2,051$. Hal ini menunjukkan bahwa H2 diterima, variabel transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Pengujian secara simultan atau Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah suatu metode persamaan regresi itu valid atau tidak. Tingkat signifikansidigunakan yaitu 5% ($\alpha = 0,05$).

Tabel. 17 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
	Model	Sumof Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	598.243	2	299.121	46.614	.000 ^b
	Residual	173.257	27	6.417		
	Total	771.500	29			
a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa						
b. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas						

Sumber: Data diolah menggunakan program SPSS 26

Berdasarkan tabel. 17 diatas hasil uji F diatas diketahui bahwa nilai Fhitung 46.614 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 dengan menggunakan taraf keyakinan 95% atau $\alpha = 5\%$. $F_{tabel} = df_1 (k - 1)$ atau F_{tabel} dimana n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen dan dependen sehingga diperoleh $F_{tabel} = 3,35$. Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui nilai Fhitung 46.614 lebih besar dari 3,35 dan tingkat signifikansi lebih kecil dari taraf standar signifikansi $0,000 = 0,05$. Sehingga keputusan yang dapat diambil adalah H_0 diterima. Artinya, penelitian yang bertujuan untuk melihat pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana, dinyatakan layak dan hasil ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi asumsi kelayakan sebuah model penelitian dengan data penelitian yang di analisis.

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan memperjelas variasi pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa. Jika R^2 semakin mendekati 1, yang berarti mendekati 100% artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel. 18 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	RSquare	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.881 ^a	.775	.759	2.53317
a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas				
b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa				

Sumber: Data diolah menggunakan program SPSS 26

Berdasarkan tabel.18 diatas menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,759 ditransformasi menjadi nilai koefisien determinasi sebesar 75,9%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pengaruh akuntabilitas dan



transparansi terhadap pengelolaan dana desa sebesar 75,9% sisanya sebesar 24,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel penelitian.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa akuntabilitas memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Artinya, semakin baik akuntabilitas maka semakin baik pula pengelolaan dana desa. Dikatakan berpengaruh karena nilai koefisien regresi 0,576 dan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf kesalahan 0,005 dengan nilai thitung $66 > t_{tabel}$ (4.416 $>$ 2,051), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil penelitian sejalan dengan yang dilakukan oleh Bahtiar & Ardiansyah (2019), Rifkayanti, (2019), Fitri Sukmawati (2019), Bangun (2021), Taslim Azis, (2021), Angelia & Rahayu, (2020), Garung *et al*, (2020), Lailatul, (2020).

Berdasarkan hasil analisa data penelitian dan keterkaitan dengan Teori Keagenan (*Agency Theory*) dimana pemerintah desa sebagai agen yang menerima amanah harus bertanggung jawabkan segala aktivitas kepada masyarakat yang dijalankan. Penerapan teori keagenan (*agency theory*) dengan akuntabilitas berkaitan erat jika akuntabilitas merendah dapat menyebabkan tingkat penyalahgunaan anggaran alokasi dana desa semakin meningkat, sehingga hal yang diperlukan dalam pengelolaan dana desa harus akuntabilitas agar lebih efisien dan efektivitas dalam memberikan pertanggung jawaban.

Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa transparansi memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Artinya, semakin baik tingkat transparansi maka semakin baik pula tingkat pengelolaan dana desa. Dikatakan berpengaruh karena nilai koefisien regresi 0,384 dan signifikansi sebesar 0,004 lebih kecil dari taraf kesalahan 0,05 dengan nilai thitung $> t_{tabel}$ (3.158 $>$ 2,051), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima. Hasil penelitian sejalan dengan yang dilakukan oleh Ayu & Wahidahwati, (2018), Muljo & Pahala, (2017), Sangki & Kairupan, (2017), Akbar (2021), Bangun (2021), Taslim Azis, (2021), Angelia & Rahayu, (2020).

Berdasarkan hasil analisa data penelitian dan Keterkaitan dengan teori keagenan (*agency theory*) dengan transparansi yaitu sebagai *agent* (penerima perangkat desa) yang menerima amanah harus terbuka kepada Masyarakat (*principal*). Jika transparansi merendah dapat menyebabkan informasi yang diterima masyarakat menjadi kurang tepat sehingga hal yang diperlukan dalam pengelolaan dana desa harus transparansi atau terbuka agar masyarakat lebih mudah untuk mengakses informasi mengenai kinerja pemerintah desa dalam memberikan pertanggungjawaban alokasi dana desa.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran. Sedangkan transparansi juga berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran. Dengan demikian akuntabilitas dan transparansi yang baik akan secara signifikan akan berpengaruh terhadap tingkat pengelolaan anggaran. Meningkatnya pengelolaan dana desa tergantung dari bagaimana kinerja, dan pertanggungjawaban untuk melaporkan aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa melalui *agent* atau perangkat desa kepada masyarakat (*principal*). Ketika akuntabilitas mengalami penurunan maka akan berdampak pada tingkat penyalahgunaan anggaran alokasi dan desa tersebut. Meningkatnya pengelolaan dana desa tergantung dari bagaimana transparansi atau keterbukaan informasi pemerintah desa kepada masyarakat yang tentunya akan memudahkan masyarakat dalam menanggapi, mengawasi dan mengevaluasi kinerja terhadap pengelolaan dana desa melalui *agent* atau pemerintah Desa kepada *principal* (masyarakat). Ketika transparansi mengalami penurunan maka akan berdampak pada informasi yang diterima oleh masyarakat mengenai alokasi dana desa kurang transparan dalam membentuk suatu tanggung jawab.

IV. REFERENS

- [1] R. D. Putri, W. Maison, and H. Hartaty, "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Seluruh Nagari di Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok)," *CEMERLANG J. Manaj. dan Ekon. Bisnis*, vol. 2, no. 3, pp. 164–184, 2022, doi: <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v2i3.314>.



- [2] A. K. Widagdo, A. Widodo, and M. Ismail, "Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa," . *J. Ekon. dan bisnis*, vol. 19, no. 2, pp. 323–340, 2016, doi: <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i2.336>.
- [3] R. G. Mais and L. Palindri, "Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan desa," *J. Akunt. Dan Gov.*, vol. 1, no. 1, pp. 57–66, 2020, doi: <https://doi.org/10.24853/jago.1.1.57-66>.
- [4] N. Handayani, P. Studi, I. Administrasi, U. L. M. E-mail, C. Sitasi, and R. Yuliani, "Strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin dalam Pengembangan Industri Kecil Menengah," *At-Taradi J. Stud. Islam*, vol. X, pp. 142–156, 2019.
- [5] Y. F. B. Bangun, "Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Kecamatan Medan Tuntungan,," *Gajah. J. Neraca*, vol. 3, no. 1, pp. 1–30, 2021, doi: <https://doi.org/10.62611/jnr.v1i1.36>.
- [6] R. A. Fitri and F. I. Arza, "Pengaruh Transparansi, Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Nagari: Studi Empiris pada Nagari di Kota Pariaman," *J. Eksplor. Akunt.*, vol. 5, no. 3, pp. 1115–1126, 2023, doi: <https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.824>.
- [7] A. R. L. Putri and Maryono, "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi Aparat Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa pada Desa di Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes," *Fair Value J. Ilm. Akunt. dan Keuang.*, vol. 4, no. 3, pp. 1668–1688, 2022, doi: <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i3Spesial Issue 3.1003>.
- [8] C. Y. Garung and L. L. Ga, "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance," *J. Akunt. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS*, vol. 8, no. 1, pp. 19–27, 2020, doi: <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>.
- [9] I. Apriliana, "Determinan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Serta Dampaknya Terhadap Kepercayaan Masyarakat," *J. Stud. Akunt. dan Keuang.*, vol. 2, no. 2, pp. 109–123, 2019, doi: <https://Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan>.
- [10] H. Haeniah, A. Animah, and Y. Mariadi, "Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa," *J. AKBIS*, vol. 6, no. 2, pp. 45–57, 2022, doi: <https://doi.org/10.35308/akbis.v6i2.6174>.
- [11] M. Fahisa and M. Afriyenti, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa," *J. Eksplor. Akunt.*, vol. 5, no. 2, pp. 89–99, 2023, doi: <https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.694>.
- [12] F. Azima, A. M. Putri, and I. P. Azhari, "Akuntabilitas Transparansingawasan Terhadap Pengelolahan Alokasi Dana Desa," *Balanc. J. Akunt. DAN BISNIS*, vol. 7, no. 2, pp. 105–116, 2022, doi: <https://doi.org/10.32502/jab.v7i2.5380>.
- [13] F. Rizky, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa," *J. Sos. Dan Hum.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–10, 2023, doi: : <https://doi.org/XX..XXXXX/ARIMA>.
- [14] H. H. Muljo, H. Kurniawati, and P. Pahala, "No Title," *Binus Bus. Rev.*, vol. 5, no. 2, pp. 537–550, 2017, doi: <https://doi.org/10.21512/bbr.v5i2.1014>.
- [15] N. T. A. Siregar, "Analisis Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah," *J. Revenue J. Ilm. Akunt.*, vol. 5, no. 2, pp. 1714–1718, 2024, doi: <https://doi.org/10.46306/rev.v5i2.724>.
- [16] S. Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D / Sugiyono*, Cetakan Ke. Bandung: Bandung: Alfabeta, 2021, 2021.

